

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH BEKERJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI TELAH MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013 TERTUANG DALAM UU NO.19 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013



ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan Ekonomi	6,8%
Inflasi	4,9%
Suku Bunga SPN 3 Bulan	5,0%
Nilai Tukar	Rp9.300,00/US\$
Harga Minyak ICP	US\$100/Barel
Lifting Minyak	900 ribu barel/hari
Lifting Gas	1.360 MBOEPD

PENDAPATAN NEGARA	Rp1529,7 T
PENDAPATAN DALAM NEGERI	Rp1525,2 T
Penerimaan Perpajakan	Rp1193,0 T
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp332,2 T
PENERIMAAN HIBAH	Rp4,5 T
BELANJA NEGARA	Rp1683,0 T
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	Rp1154,4 T
Belanja K/L	Rp594,6 T
Belanja Non-K/L	Rp559,8 T
TRANSFER KE DAERAH	Rp528,6 T
Dana Perimbangan	Rp444,8 T
Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian	Rp83,8 T
SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(Rp153,3 T)
% Defisit Terhadap PDB	(1,65)
PEMBIAYAAN (I + II)	Rp153,3 T
Pembiayaan Dalam Negeri	Rp172,8 T
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(Rp19,5 T)

7 CIRI MENONJOL (KHAS) APBN 2013

1. Pendapatan negara meningkat lebih cepat daripada belanja negara ► komitmen untuk memperkuat kemandirian APBN;
2. Peningkatan belanja modal, terutama untuk infrastruktur ► bukti kuatnya komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja;
3. Peniadaan Pasal Larangan Penyesuaian Harga BBM dan Pengendalian Subsidi Listrik ► komitmen kuat pemberian fleksibilitas dan deskresi kepada Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran subsidi energi;
4. Transfer ke Daerah meningkat lebih cepat dari Belanja Pemerintah Pusat ► menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah untuk percepatan pembangunan daerah, memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan;
5. Defisit menurun ► bukti kuatnya komitmen untuk menjaga kesinambungan fiskal dan menjaga kesehatan APBN;
6. Pengutamaan Pembiayaan Dalam Negeri ► meneguhkan tekad membangun dengan kekuatan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada luar negeri;
7. Sarat langkah-langkah antisipasi ketidakpastian ekonomi global dengan pasal-pasal antisipasi krisis dalam UU APBN 2013.



PENDAPATAN NEGERA Rp1.529,7 T

Arah Kebijakan Fiskal

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Melalui Upaya Penyehatan Fiskal



Kebijakan Penerimaan Pajak

- Ekstensifikasi:
 - Tetap melanjutkan ekstensifikasi yang pro aktif melalui sensus pajak nasional;
 - Memperluas basis pajak dengan kebijakan PPh yang memberikan fasilitas bagi usaha kecil dan menengah dan penyederhanaan dalam pembayarannya;
 - Melakukan perbaikan secara fundamental sistem administrasi PPN yang dapat mengurangi kebocoran keuangan negara & praktek-praktek korupsi;
 - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di dalam penggalan potensi pajak;
 - Memperbaiki kualitas SDM & menambah jumlah SDM Pajak dalam rangka meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak, baik untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, maupun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia.
- Intensifikasi:
 - Peningkatan penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan menangani masalah *transfer pricing*.



Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

- Pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu;
- Rencana pengenaan cukai atas minuman bersoda dan berpemanis;
- Tahun 2013 seluruh kantor Bea dan Cukai sudah beroperasi sebagai kantor modern penerapan prinsip pelayanan yang baku;
- Informasi dan Teknologi yang terintegrasi bagi pelayanan kepabeanan dan cukai;
- Otomasi administrasi piutang bea dan cukai;
- Penerapan *billing system* untuk pelayanan cukai.

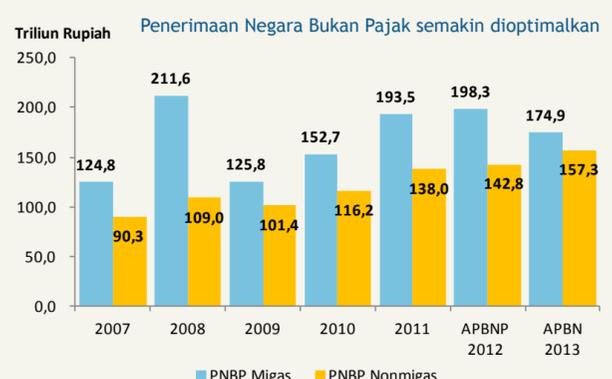
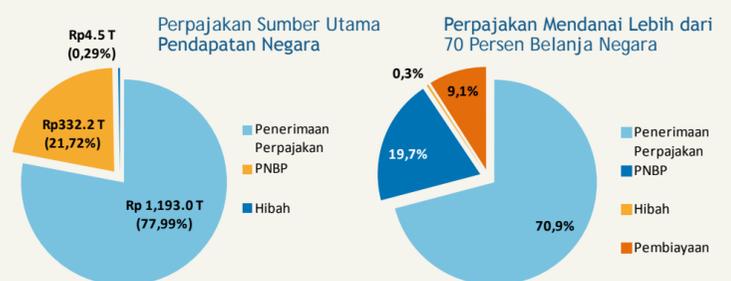
Kebijakan Insentif Perpajakan

- Kebijakan perpajakan yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat pendapatan rendah melalui peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15.840.000/tahun menjadi Rp24.300.000/tahun;
- Kebijakan perpajakan yang diarahkan pada industri yang ramah lingkungan melalui pembebasan/pengurangan PPNBM untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan (*Hybrid and Low Cost Green Car*);
- Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPNBM terhadap Barang Kena Pajak (BKP) untuk eksplorasi hulu migas dan panas bumi.



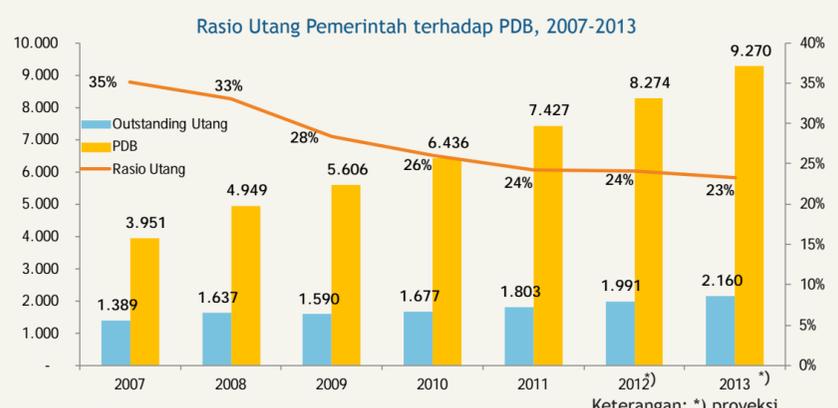
Langkah Optimalisasi PNBPN

- Efisiensi *cost recovery*;
- Pencapaian target lifting migas;
- Optimalisasi SDA nonmigas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi);
- Optimalisasi investasi untuk efisiensi BUMN;
- Terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBPN.



PEMBIAYAAN Rp153,3 T

- Pembiayaan anggaran melalui utang dan nonutang tahun 2013 direncanakan Rp153,3 T.
- Sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri Rp172,8 T, dan sumber pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp19,5 T.
- Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif kecil dan semakin menurun, serta diperkirakan sebesar 23 persen pada tahun 2013. Angka ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi perekonomian negara.
- Pengeluaran pembiayaan untuk mendukung antara lain :
 - Program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) melalui PMN kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo, serta dana bergulir;
 - Pembangunan infrastruktur melalui Pusat Investasi Pemerintah, dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan dan Geothermal, PMN, serta Kewajiban Penjaminan.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH BEKERJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI TELAH MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013 TERTUANG DALAM UU NO.19 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013

BELANJA NEGARA Rp1.683,0 T

Arah Kebijakan Belanja Negara

Meningkatkan Kualitas Belanja Negara Melalui Pengendalian Subsidi dan Peningkatan Belanja Infrastruktur

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.154,4 T

Pembangunan Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Rp201,3 T

Sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur 2013, antara lain:



Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Rp77,9 T, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dalam rangka peningkatan daya saing produksi, serta menjalin keterhubungan antar wilayah, dengan sasaran antara lain:

- Pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara;
- Pembangunan 383,37 kilometer jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 84 unit lokomotif, Kereta Rel Diesel (KRD), Kereta Rel Listrik (KRL), tram, dan railbus;
- Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 19.370 km;
- Pembangunan kapal perintis dan penumpang sebanyak 20 unit; serta pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan.

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Rp22,4 T, untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran:

- Pembangunan 115 *twins block* rusunawa dan rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan sebanyak 60.000 unit.

Infrastruktur Irigasi Rp19,5 T, untuk peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran:

- Luas layanan jaringan irigasi sekitar 111.251 ha dan membangun 275 embung/situ.

Infrastruktur Energi untuk peningkatan ketahanan energi dan **Pembangunan Infrastruktur Lainnya Rp62,8 T**, dengan sasaran:

- Pembangunan transmisi sekitar 4.551,2 kms, Gardu Induk 4.860 MVA, peningkatan kapasitas pembangkit 188 MW, dan infrastruktur lainnya.

Kebijakan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik 2013

Menghemat anggaran subsidi untuk belanja yang lebih produktif

- Pemanfaatan hasil penghematan subsidi listrik sebesar Rp11,8 T:
- Menunjang penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional;
 - Meningkatkan mobilitas dan bersifat mengatasi kesenjangan antarwilayah;
 - Meningkatkan ketahanan pangan; dan
 - Meningkatkan ketahanan energi.

Upaya Meringankan Beban dan Mensejahterakan Rakyat



Layanan Pendidikan Yang Murah dan Terjangkau

Anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan biaya terjangkau. Anggaran pendidikan naik lebih dari 2 kali lipat, dari Rp142,2 T tahun 2007 menjadi Rp336,8 T tahun 2013. Alokasi anggaran pendidikan tersebut diprioritaskan antara lain untuk:

- Melanjutkan program BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi sekitar 45,0 juta siswa SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha;
- Memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal, antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 8,9 juta siswa SMA/SMK/MA, pembangunan 224 USB dan sekitar 6.900 RKB SMA/SMK/MA;
- Menyediakan beasiswa siswa dan mahasiswa miskin bagi sekitar 9,4 juta siswa/mahasiswa;
- Menyediakan dana tunjangan profesi guru Rp43,1 T;
- Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan rusak sedang untuk semua jenjang pendidikan.

Penanggulangan Kemiskinan

Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan meningkat lebih dari 2 kali lipat dari Rp53,1 T pada tahun 2007, menjadi sebesar Rp115,5 T pada tahun 2013. Sasaran menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5-10,5 persen melalui:

- Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dalam bentuk bantuan tunai bersyarat dengan anggaran Rp2,8 T untuk keluarga miskin dengan syarat pendidikan dan kesehatan dengan sasaran 2,4 juta RTSM;
- Penyediaan beras dengan harga murah untuk rakyat miskin dengan anggaran Rp17,2 T untuk 15,5 juta RTS;
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program PNPMD Mandiri, yang antara lain terdiri atas: (1) PNPMD Perdesaan di 5.230 kecamatan (Rp8,0 T); dan (2) PNPMD Perkotaan di 10.922 Kelurahan (Rp1,7 T).

Layanan Kesehatan Murah Untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan, meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebesar Rp24,5 T tahun 2007 menjadi Rp55,9 T tahun 2013.

Anggaran tersebut diprioritaskan antara lain untuk:

- Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Puskesmas dan kelas III rumah sakit Pemerintah untuk masyarakat miskin melalui program Jamkesmas bagi 86,4 juta jiwa;
- Pemberian pelayanan persalinan (Jampersal) bagi sekitar 2,7 juta ibu hamil;

- Peningkatan jumlah Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk sebanyak 91 Puskesmas;
- Peningkatan persentase perawatan balita yang bergizi buruk hingga mencapai 100 persen;
- Peningkatan persentase rumah sakit yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas hingga mencapai 90%.

mulai 2014 melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan terutama padi dan palawija;

- Peningkatan keterjangkauan harga dan distribusi pangan, melalui stabilisasi harga bahan pangan di dalam negeri, peningkatan efisiensi distribusi dan logistik pangan antarwilayah dan antarmusim, dan pengendalian ekspor-impor bahan pangan.



- Cadangan Beras Pemerintah (CBP): Rp2,0 T Berfungsi sebagai cadangan beras nasional (dikelola Perum BULOG) untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian gejolak harga beras, untuk memenuhi kesepakatan cadangan beras darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve).

Penguatan Ketahanan Pangan

Anggaran untuk penguatan ketahanan pangan naik sekitar 3 kali lipat dari Rp23,3 T pada tahun 2007 menjadi Rp63,2 T pada tahun 2013, antara lain digunakan untuk:

- Peningkatan produksi pangan terutama menuju surplus beras 10 juta ton

Program-program Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan Tahun 2013

- Program Raskin (Subsidi Pangan) Rp17,2 T: Operasi pasar beras khusus didistribusikan kepada masyarakat miskin untuk membeli beras dengan harga terjangkau (RTS 15,5 juta);

Mewujudkan Suasana Aman Tenteram Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha Rp118,3 T



Bidang Pertahanan Negara

Anggaran bidang pertahanan meningkat hampir 3 kali lipat dari Rp30,7 T pada tahun 2007, menjadi Rp81,8 T pada tahun 2013. Output yang dihasilkan dari anggaran tersebut di tahun 2013, antara lain berupa:

- Pengadaan kendaraan taktis (Rantis) 2,5 ton 4x4 dan kendaraan angkut munisi 5 ton;
- Pengadaan 6 (enam) pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat pengganti MK-53 dan dukungannya, pesawat CN-295 (pengganti F27), helikopter full combat SAR mission dan dukungannya;
- Pengadaan helikopter angkut, helikopter serang beserta persenjataan & munisi, helikopter serbu beserta persenjataan dan munisi, ranpur Main Battle Tank (MBT), ME Armed 155 MM Howitzer, Rudal MLRS, Rudal Arhanud;

- Pengadaan MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hydro-oceanografi, kapal latihan (pengganti KRI DWR), CN-235 MPA, helikopter AKS + Sucad, Panzer Amphibi BTR 80 A, Tank Amphibi BMP 3F dan Sucad, Multi Launch Rocket System (MLRS) Kal 122 m.

Bidang Keamanan dan Ketertiban

Anggaran untuk mendukung terciptanya keamanan, ketertiban umum dan kepastian hukum meningkat dari Rp28,3 T pada tahun 2007, menjadi Rp36,5 T pada tahun 2013. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk:

- Pengembangan peralatan Polri berupa pengadaan 15.336 unit alat utama dan alat khusus Sabhara, serta 28.590 unit alat utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme;
- Mencapai target strategi keamanan kewilayahan sebanyak 2.455 layanan, dan penyelesaian tindak pidana kewilayahan sebanyak 33.725 perkara; dan
- Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia.

Subsidi Rp317,2 T

Diperlukan, namun perlu pengendalian

Subsidi Energi

Rp274,7 T

Kebijakan dan besaran subsidi energi (BBM dan listrik) di bawah tanggung jawab Kementerian ESDM.



Subsidi BBM Rp193,8 T:

Kebijakan subsidi BBM tahun 2013 antara lain adalah:

- Mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi, antara lain melalui pembatasan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas Pemerintah dan pribadi;
- Meningkatkan program konversi BBM bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG) terutama untuk angkutan umum kota-kota besar;
- Melanjutkan program konversi mitan ke LPG tabung 3 kg;
- Melanjutkan pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk biodiesel sekitar 7,5 persen.

Subsidi Listrik Rp 80,9 T:

Kebijakan subsidi listrik tahun 2013 antara lain adalah:

- Memacu pemenuhan investasi 10 ribu MW dan meningkatkan rasio elektrifikasi;
- Mendorong penghematan konsumsi listrik;
- Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan tenaga surya, biomasa, angin, air dan panas bumi;
- Penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rasio elektrifikasi serta tidak membebani kepada rakyat kecil yaitu para pelanggan listrik 450MV dan 900MV.

Subsidi Non Energi

Rp42,5 T

- Subsidi Pangan Rp17,2 T: membantu masyarakat kurang mampu.
- Subsidi Pupuk Rp16,2T dan subsidi benih Rp1,5 T: membantu petani dan mendukung peningkatan ketahanan pangan.



- Subsidi kewajiban pelayanan publik Rp1,5 T, diberikan kepada:
 - PT KAI untuk penugasan jasa angkutan KA penumpang kelas ekonomi;
 - PT Pelni untuk layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi;
 - LKBN Antara, antara lain untuk penugasan berita berupa teks, foto dan televisi.
- Subsidi bunga kredit program Rp1,2 T: mendukung program

pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan dan program diversifikasi energi.

- Subsidi pajak Rp4,8 T: mendukung program peningkatan daya saing industri tertentu dan pengembangan industri strategis di dalam negeri.

Transfer ke Daerah Rp528,6 T



Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Dana Perimbangan Rp444,8 T, terdiri atas:

- DBH Rp102,0 T dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- DAU dialokasikan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAU Rp311,1 T, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/ kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional. DAK Rp31,7 T, diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif rendah dalam membiayai pelayanan

publik sesuai standar pelayanan minimal, kebijakan *affirmative policy* kepada 183 daerah tertinggal, dan pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Pertanian ke DAK.

Dana Otonomi Khusus Rp13,4 T, dialokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua Rp4,4 T, Papua Barat Rp1,9 T, dan Aceh Rp6,2 T, serta dana tambahan infrastruktur Rp1,0 T.

Dana Penyesuaian Rp70,4 T

- diadakan antara lain untuk:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp43,1 T, untuk guru PNSD sertifikasi; dan Rp2,4 T untuk tambahan penghasilan guru PNSD non-sertifikasi;
 - BOS Rp23,4 T, untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah;
 - Dana Insentif Daerah Rp1,4 T, diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia